



2023

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang - saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari partisipasi dari segenap aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah - mudahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023.

Arosuka, Februari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**



DENI PRIHATNI, ST. MT
NIP. 197105051998031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
I.1. Latar Belakang	3
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	8
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)	10
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU	10
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok	10
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok	11
II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	12
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	14
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III	16
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD	17
III.3. Program dan Kegiatan	18

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

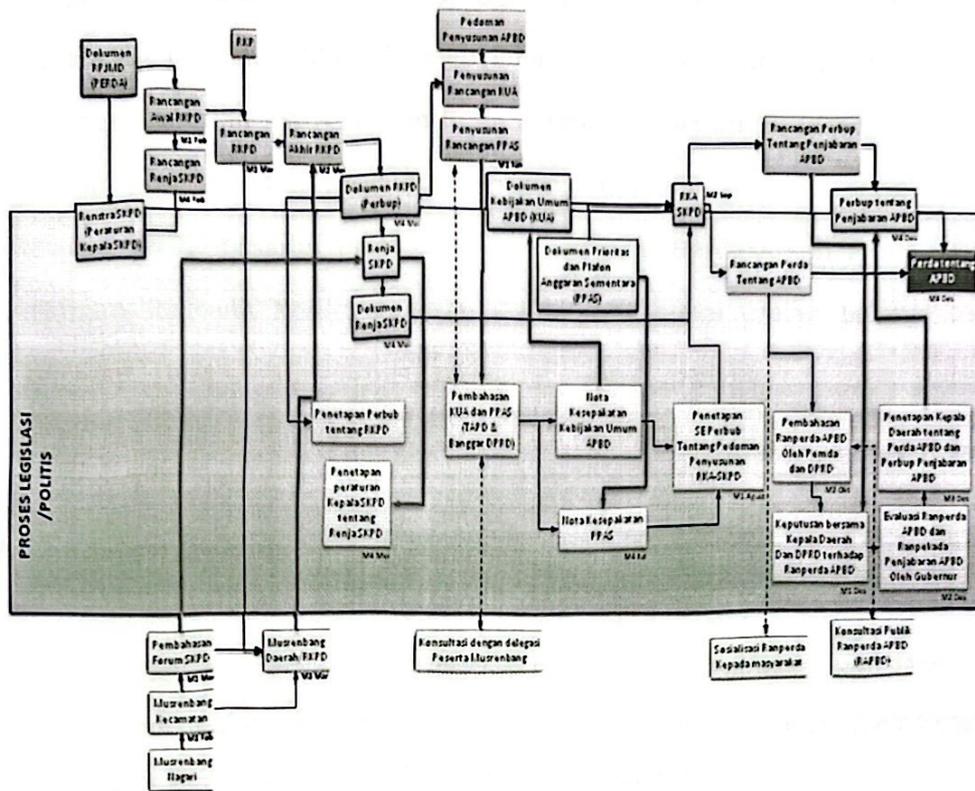
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD pada tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan Propinsi dan Nasional/K/L, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan

pembangunan Propinsi dan Nasional/K/L sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok.

Adapun hubungan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Hubungan Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusunlah Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen

yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah finalisasi Rencana Kerja (Renja), akan disusun KUA dan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.
2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) ini dibagi kedalam beberapa bab yang berisikan materi- materi yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu**
Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan serta rencana tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

Kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu (2021) ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2023.

Perkiraan tingkat pencapaian realisasi target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan tahun berjalan (2021) dimana sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan tingkat capaian sasaran strategis yang diukur dari indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat disimpulkan untuk Tahun 2021 capaian realisasi dari indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah atau dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang capaian kinerja 85 % - 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 69 % - 84 % termasuk kategori baik, rentang 55 % - 68 % adalah berkategori cukup dan 0 s/d < 53 % adalah gagal.

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 1 Persentase capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Tersedianya perumahan yang layak	1	Persentase rumah layak huni	%	70,73	82,5	116,61
		2	Persentase penanganan rumah yang terkena dampak bencana	%	10,00	0,00	0,00
II	Berkurangnya kawasan kumuh di Kabupaten Solok	3	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	10,00	13,3	133
III	Terfasilitasinya kebutuhan tanah yang clean dan clear untuk pembangunan infrastruktur	4	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	50	54,45	108,90
IV	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Kinerja	5	Kategori Evaluasi AKIP	Kategori	BB	BB	Tercapai

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2021 termasuk kategori **sangat baik** karena realisasi dari program atau kegiatan sudah seluruhnya tercapai dan terlaksana dengan baik dan bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini didukung karena adanya ketersediaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Solok, dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi serta Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk kategori sangat baik karena realisasi dari program atau kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2021 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2021) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 25 orang PNS, dan 10 orang CPNS, dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan di daerah
5. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
6. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.
7. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat
8. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
9. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang
10. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah
11. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif terhadap permasalahan - permasalahan dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah, telaahan terhadap RPJMD, telaahan terhadap kebijakan

Kementerian/Lembaga dan Propinsi serta telahaan terhadap RTRW Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman yang layak untuk mendukung pencapaian target kinerja di Kabupaten Solok.
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid tentang Rumah Tidak Layak Huni (by name by address) dan luasan kawasan kumuh untuk perencanaan pembangunan.
4. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
5. Adanya target dari Kementerian PUPR yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak, dimana masih terdapatnya 37 lokasi kawasan kumuh di kabupaten Solok dengan luasan 574 Ha.
6. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni, dimana pada akhir tahun 2016 masih menyisakan 12.721 unit/16,11% rumah yang tidak layak huni di kawasan Pemda Kabupaten Solok.
7. Adanya target dari SPM perumahan rakyat yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi, yaitu terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sehubungan belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur dan keterbatasan anggaran padatahun sebelumnya.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan melaksanakan 6 program dengan 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Untuk Tahun 2021 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sama dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), jadi tidak ada perbedaan antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 Review terhadap rancangan awal RKPD berikut;

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terbitnya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrebang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel. 3 berikut :

TABEL 2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK

Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rancangan Awal Tahun 2023		Rancangan Awal Tahun 2023	
			Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	5	6
1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	4.089.953.520	100%	4.089.953.520
1 04 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	381.322.151	100%	381.322.151
1 04 01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	145.322.151	4 Dokumen	145.322.151
1 04 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	236.000.000	4 Laporan	236.000.000
1 04 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	3.219.185.649	100%	3.219.185.649
1 04 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	3.174.232.774	36 Orang/Bulan	3.174.232.774
1 04 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	44.952.875	2 Laporan	44.952.875
1 04 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	252.940.000	100%	252.940.000
1 04 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	8.250.000	0	8.250.000
1 04 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket		0	
1 04 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	9.350.000	10 Paket	9.350.000
1 04 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90 Laporan	235.340.000	90 Laporan	235.340.000
1 04 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.249.670	100%	10.249.670
1 04 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.650.000	1 Laporan	1.650.000
1 04 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	8.599.670	1 Laporan	8.599.670
1 04 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	226.256.050	100%	226.256.050
1 04 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	210.300.000	16 Unit	210.300.000

1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	15.956.050	1 Unit	15.956.050
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	100%	692.119.416	100%	692.119.416
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota	Persentase nagari yang mendapat sosialisasi	27%	130.000.000	27%	130.000.000
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupatenkota	Orang	130.000.000	Orang	130.000.000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KabupatenKota	Persentase rumah korban bencana yang terlayani	100%	507.119.416	100%	507.119.416
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupatenkota yang direhabilitasi	10	295.000.000	10	295.000.000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupatenkota yang terbangun	5	212.119.416	5	212.119.416
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	55.000.000	100%	55.000.000
1	04	02	2.06	01	Facilitasi Pemanunhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan	15 Dokumen	55.000.000	15 Dokumen	55.000.000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	33,03%	4.208.940.254	33,03%	4.208.940.254
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah KabupatenKota	Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang terlayani	33,03%	4.208.940.254	33,03%	4.208.940.254
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah	1500 unit	4.208.940.254	1500 unit	4.208.940.254
1	04	03			Penerbitan Izn Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang terlayani	35%	5.210.500.000	35%	5.210.500.000
1	04	03	2.01		Penerbitan Izn Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase izin bangunan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	20%	632.000.000	20%	632.000.000
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan Jalur Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan atau direview serta terlegalisasi	1 dokumen	425.000.000	1 dokumen	425.000.000
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	1 Laporan	207.000.000	1 Laporan	207.000.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang terlayani	20%	210.000.000	20%	210.000.000

1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	18 Dokumen	210.000.000	18 Dokumen	210.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan	20%	4.368.500.000	20%	4.368.500.000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	5 50	4.368.500.000	5 50	4.368.500.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	65%	555.595.736	65%	555.595.736
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggara PSU Perumahan	Persentase fasilitas PSU perumahan yang terhangun	65%	555.595.736	65%	555.595.736
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian	25 Lokasi	555.595.736	25 Lokasi	555.595.736
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	100%	72.009.631	100%	72.009.631
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik-konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	72.009.631	100%	72.009.631
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.009.631	1 Dokumen	72.009.631
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan	78%	55.074.985	78%	55.074.985
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah/Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang diberikan ganti kerugian	1 persil	55.074.985	1 persil	55.074.985
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah kab/kota	1 Dokumen	55.074.985	1 Dokumen	55.074.985
2	10	10			PROGRAM PENAGUNAAN TANAH	Persentase persil tanah yang dilata	92,35%	696.829.448	92,35%	696.829.448
2	10	10	2.10		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang penggunaannya disertifikasikan dalam satu daerah	50 persil	696.829.448	50 persil	696.829.448
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kab/kota	50 Dokumen	696.829.448	50 Dokumen	696.829.448

Tabel 3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Rp
1	2	3	4	5		
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1 Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	4.087.044.389
		1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	381.322.151
		1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	145.322.151
		1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	236.000.000
		1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	3.219.185.649
		1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	3.174.232.774
		1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	44.952.875
		1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	172.940.000
		1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	8.250.000
		1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	9.350.000
		1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90 Laporan	155.340.000
		1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.249.670
		1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.650.000
		1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	8.599.670
				1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah yang terpelihara
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	16 Unit	207.390.869
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	95.956.050
2 Mewujudkan kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak	1 Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak	1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	100%	692.119.416
		1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang mendapat sosialisasi	1 Unit	130.000.000
		1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan	Orang	130.000.000
		1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terlayani	100%	507.119.416
		1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terrehabilitasi	10 Unit	295.000.000
		1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	5	212.119.416
		1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	55.000.000
		1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pembang/belaku pembangunan rumah untuk	15 Dokumen	55.000.000
		1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	33,03%	4.208.940.254
		1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang terlayani	33,03%	4.208.940.254
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya	1500 unit	4.208.940.254		

1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata	35%	5.210.500.000
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase izin bangunan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	20%	632.000.000
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan	1 Dokumen	425.000.000
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	1 Laporan	207.000.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang tertata	20%	210.000.000
1	04	03	2.02	01	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	18 Dokumen	210.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan	20%	4.368.500.000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	1500 Unit	4.368.500.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	65%	555.595.736
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggara PSU Perumahan	Persentase fasilitas PSU perumahan yang terbangun	65%	555.595.736
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	25 Lokasi	555.595.736
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	100%	72.009.631
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik-konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	72.009.631
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.009.631
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan	78%	55.074.985
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang diberikan ganti kerugian	1 persil	55.074.985
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan pemerintah daerah kab/kota	1 Dokumen	55.074.985
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase persil tanah yang ditata	92,35%	696.829.448
2	10	10	2.10		Pengunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang penggunaannya disertifikatkan dalam satu daerah	50 persil	696.829.448
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kab/Kota	50 Dokumen	696.829.448

4 Terpenuhiya kebutuhan tanah yang clean dan clear untuk pembangunan infrastruktur

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2020-2024 adalah ***“Kementerian PUPR yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden; Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastuktur yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tujuan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktifitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan serta konservasi dan pengurangan resiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerjatinggi.

Adapun lima Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten profesional.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tugas teknis lainnya.

Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan di Kabupaten Solok karena masih sangat terbatasnya personil yang dapat mengikuti sosialisasi dan pembekalan dari pusat dan pada umumnya personil yang diutus bukan orang yang akan menindaklanjuti pekerjaan.

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD

Renja merupakan pedoman perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 1 (satu) tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka Renja tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan		Persentase Peningkatan Kondisi Perumahan dan Permukiman
		Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang Ditingkatkan
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
		Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki
2.	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah
		Meningkatnya tata kelola pertanahan	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola
3.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur

III.3. Program dan Kegiatan

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Untuk tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan rencananya akan melaksanakan 8 program dengan 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan, program - program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - Pembangunan rumah bagi korban bencana
 - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha

4. Program Kawasan Permukiman
 - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
 - Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
 - Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
 - Perbaiki rumah tidak layak huni
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
 - Kegiatan Urusan Penyelenggara PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/kota
8. Program Penatagunaan Tanah
 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kosolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

TABEL 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022		Prakiraan Maju Tahun 2023	
				Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10
1 04 01	Program yang mengurus Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			4.021.485.649		4.089.953.520
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	100%	337.870.200	100%	381.322.151
1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4 Dokumen	105.291.450	4 Dokumen	145.322.151
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	4 Laporan	232.578.750	4 Laporan	236.000.000
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Solok	100%	3.281.079.067	100%	3.219.185.649
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok	36 Orang/Bulan	3.240.212.817	36 Orang/Bulan	3.174.232.774
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Solok	2 Laporan	40.866.250	2 Laporan	44.592.875
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Solok	100%	168.663.000	100%	252.940.000
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pembelian dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Solok		7.500.000	5 Paket	8.250.000
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	Kab. Solok	10 Paket	8.500.000	10 Paket	9.350.000
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok	80 Laporan	152.663.000	90 Laporan	235.340.000
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Solok	1 Laporan	7.817.882	1 Laporan	8.599.670
1 04 01 2.09	Penyediaan barang milik pemerintah	Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kab. Solok	100%	224.555.500	100%	226.256.050
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizannya	Kab. Solok	16 Unit	210.050.000	16 Unit	210.300.000

1	04	01		Program renungng urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		4.021.465.649		4.089.953.520	
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	337.870.200	100%	381.322.151	
1	04	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Solok	14.505.500	1 Unit	15.956.050	
1	04	02		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni	Kab. Solok	664.158.350	100%	692.119.416	
1	04	02	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase nagari yang mendapat sosialisasi	Kab. Solok	120.000.000	27%	130.000.000	
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	Kab. Solok	Orang	130.000.000	
1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terlayani	Kab. Solok	494.158.350	100%	507.119.416	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang direhabilitasi	Kab. Solok	7	10 Unit	295.000.000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang dibangun	Kab. Solok	5	5	212.119.416
1	04	02	2.06		Pembelian Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	Kab. Solok	100%	55.000.000	
1	04	02	2.06	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pembelian Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/peleku pembangunan rumah untuk pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Kab. Solok	15 Dokumen	55.000.000	
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penciptaan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Kab. Solok	4.038.902.460	30,08 %	4.208.940.254	
1	04	04	2.01	Penciptaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang terlayani	Kab. Solok	4.038.902.460	30,08 %	4.208.940.254	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Penciptaan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk penciptaan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang dididatifikasi	Kab. Solok	1500 unit	4.208.940.254	
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata	Kab. Solok	29%	5.210.500.000		

1	04	01			Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretarian		4.021.485.649		4.089.953.520
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	100%	337.870.200	381.322.151
1	04	03	2.01		Pembelian dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ltn bangunan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	Kab. Solok	15%	600.000.000	632.000.000
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Lagalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan atau terreview serta dilagalisasi	Kab. Solok	1 dokumen	400.000.000	425.000.000
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Kab. Solok	1 Laporan	200.000.000	207.000.000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang tertata	Kab. Solok	15%	200.000.000	210.000.000
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Kab. Solok	16 Dokumen	200.000.000	210.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Persentase kualitas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan	Kab. Solok	15%	4.200.000.000	4.368.500.000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Kab. Solok	1500 Unit	4.200.000.000	4.368.500.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kab. Solok	62%	533.150.117	555.595.736
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggara PSU Perumahan	Persentase fasilitas PSU perumahan yang terbangun	Kab. Solok	62%	533.150.117	555.595.736
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah titik perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian	Kab. Solok	20 Lokasi	533.150.117	555.595.736
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	Kab. Solok	100%	69.100.500	72.009.631
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik-konflik pertanahan yang tertasalisasi	Kab. Solok	100%	69.100.500	72.009.631
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Perantahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik, dan perkara dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	1 Dokumen	69.100.500	72.009.631
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan	Kab. Solok	75%	52.850.000	55.074.895
2	10	05	2.01		Penyelesaian MasalahGanti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perail tanah yang diberikan ganti kerugian	Kab. Solok	1 perail	52.850.000	55.074.895

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2023 diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Disadari bahwa pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.

Pencapaian target kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah atau Visi dan Misi Kabupaten Solok.

Arosuka, Februari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**



DENI PRIHATNI, ST. MT
NIP. 197105051998031017